



ASPD dan Krisis Kejujuran



SETIAP tahun, Asesmen Standar-disasi Pendidikan Daerah (ASPD) menjadi penentu masa depan bagi pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, tahun ini ASPD dibayang-bayangi isu

PD tingkat SMP Mapel Matematika. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, mengapa sekolah rela mengorbankan integritas demi meraih nilai tinggi? Dan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab?

Fenomena kecurangan ini tentu bukan pertama kali dan satu-satunya. Hal ini juga menjadi catatan merah dari sistem pendidikan yang sejak lama mengalami ketimpangan. Tekanan dari lingkungan sosial, ekspektasi orangtua, dan persepsi bahwa nilai akademik adalah segalanya telah menciptakan persaingan yang tidak adil.

Kegagalan Sistem

Dalam situasi seperti ini, saat capaian angka menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan dan nilai kejujuran tidak ditanamkan secara konsisten, kecurangan pun dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Ini tentu bukan hanya kesalahan individu guru atau siswa, tetapi juga kegagalan sistem yang membiarkan celah-celah manipulasi tetap terbuka.

Sejatinya, apa yang membuat siswa bersedia curang? Alasannya beragam. Ada yang merasa tak percaya diri bersaing secara adil, ada pula yang menilai sistem seleksi terlalu fokus pada hasil akhir, bukan proses belajar. Lemahnya pengawasan ASPD dan krisis kejujuran di kalangan pelajar juga menjadi faktor penting. Ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter belum berjalan efektif, baik di sekolah maupun di rumah.

Siswa tidak serta-merta lahir dengan niat untuk menipu. Mereka dibentuk oleh lingkungan yang lebih menghargai hasil ketimbang proses. Ketika pelaku kecurangan justru tidak mendapatkan hukuman ataupun konsekuensi berat, kepercayaan terhadap sistem yang adil pun memudar.

Suwanto

Tanggung jawab membentuk karakter tidak hanya berada di tangan sekolah. Peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting. Ketika orangtua menuntut hasil tanpa memperhatikan proses atau bahkan mendorong penggunaan joki, nilai-nilai moral yang semestinya dijunjung tinggi akan terkikis.

Selain itu, paparan terhadap media sosial dan budaya viral juga turut mempengaruhi krisis integritas. Siswa lebih sering melihat kesuksesan instan daripada perjuangan panjang. Akibatnya, mereka terdorong untuk mengambil jalan pintas ketimbang bekerja keras secara jujur.

Kita tidak bisa hanya mengandalkan hukuman sebagai respons terhadap kecurangan. Pendekatan seperti itu hanya akan mendorong praktik curang yang lebih tersembunyi. Yang lebih penting adalah membangun lingkungan belajar yang sehat, menghargai proses pembelajaran, menanamkan nilai kejujuran, dan membenahi sistem seleksi yang terlalu menekankan kompetisi.

Pengawasan Ketat

Pemerintah dan panitia pelaksana ASPD perlu memperkuat sistem pengawasan yang adil dan menyeluruh. Teknologi memang bisa membantu mencegah kecurangan, namun langkah yang lebih penting adalah memastikan pengawasan yang ketat sehingga ASPD berjalan dengan lancar.

Sekolah perlu menjadi tempat pertama yang secara aktif menanamkan nilai kejujuran, bukan hanya sebagai teori dalam mata pelajaran pendidikan agama atau PPKn, tetapi sebagai praktik nyata dalam keseharian. Guru harus diberi

ruang dan dukungan untuk menjadi pembimbing karakter, bukan sekadar pengajar materi. Orangtua pun perlu mengubah cara pandang bahwa keberhasilan anak bukan ditentukan oleh sekolah tujuannya, melainkan oleh kualitas dirinya sebagai individu yang jujur dan bertanggung jawab.

Isu kecurangan dalam ASPD tahun ini harus menjadi peringatan keras bagi kita semua. Ini bukan hanya masalah kebocoran soal, tetapi tentang bagaimana sistem pendidikan gagal menanamkan nilai integritas. ASPD seharusnya menguji kemampuan akademik, bukan kelihaihan dalam menyiasati sistem. Jika praktik curang dibiarkan menjadi kebiasaan, maka pendidikan kita akan kehilangan makna sejatinya.

Kita sedang menghadapi bukan sekadar krisis prestasi, tetapi juga krisis moral. Jika tidak segera diatasi dari akar melalui rumah, sekolah, hingga kebijakan, generasi masa depan kita mungkin akan belajar satu pelajaran pahit, bahwa dalam sistem ini, kejujuran merupakan barang yang langka. (*)-d

Suwanto, guru di MTs Muhammadiyah Karangtijen Yogyakarta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005